






**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

# **RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINSOSP2KB  
KOTA PEKALONGAN**



**TAHUN 2026**

-  (0285) 422868
-  [dinsosp2kb.pekalongankota.go.id](http://dinsosp2kb.pekalongankota.go.id)
-  Jalan Sriwijaya No. 40  
Kota Pekalongan

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Alhamdulillah dengan rahmatNya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Ranwal Renja Dinsos P2KB) Kota Pekalongan Tahun 2026 telah selesai disusun. Ranwal Renja Perangkat Daerah adalah rancangan awal dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan program/kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ranwal Renja tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinsos P2KB 2021-2026 pada tahun terakhir, dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Ranwal Renja Dinsos Tahun 2026 mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Dinsos P2KB tahun 2024, keberlanjutan rencana kerja tahun 2025, dinamika dan permasalahan yang berkembang di masyarakat termasuk masukan pokok-pokok pikiran DPRD dan diarahkan agar selalu relevan dengan perkembangan terkini. Dalam Ranwal Renja ini secara rinci telah ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinsos P2KB Kota Pekalongan pada tahun 2026. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan Ranwal Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Dinsos P2KB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal.

Pekalongan, 28 Februari 2025  
Kepala Dinsos P2KB Kota  
Pekalongan



**YOS ROSYIDI, SIP, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP 19660516 198603 1007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika .....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	34
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	35
3.3 Program dan Kegiatan .....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	47
BAB V PENUTUP .....	52
5.1 Catatan Penting.....	52
5.2 Kaidah Pelaksanaan .....	52
5.3 Rencana Tindak lanjut.....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024.....	10
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun 2023 Target Dan Proyeksi Tahun 2025 dan Tahun 2026.....	15
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Pekalongan .....	23
Tabel T-C.32	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 .....	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DinsosP2KB.....	36
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinsos P2KB Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	38
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

---

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Amanat ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Organisasi Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu Tahun Anggaran sehingga memberikan gambaran mengenai Tujuan, Sasaran dan target kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Secara fungsional Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Kota Pekalongan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem pengelolaan keuangan.

Tahapan penyusunan Renja PD sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 meliputi :

a. Persiapan penyusunan

- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan rancangan akhir
- f. Penetapan

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD dengan Renstra PD. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra PD

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

---

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja DINSOS P2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
  13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
  14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
  15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 1);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
20. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun maksud d2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

---

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

#### **1. Maksud**

Dokumen Renja DINSOS P2KB Kota Pekalongan disusun dengan maksud untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas kerja serta pedoman bagi DINSOS P2KB Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2. Tujuan**

Dokumen Renja DINSOS P2KB Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DINSOS P2KB Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

- penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

---

Rancangan awal Rencana Kerja DINSOS P2KB Kota Pekalongan Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja DINSOS P2KB, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

###### **1.1 Latar Belakang.**

Memuat tentang pengertian Renja Dinsos P2KB, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra).

###### **1.2 Landasan Hukum.**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja DINSOS P2KB Tahun 2026.

###### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

###### **1.4 Sistematika Penulisan.**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

###### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Dinsos P2KB Kota Pekalongan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinsos P2KB berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Dinsos P2KB dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Selain itu, juga untuk dapat diketahui dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasannya. Kemudian menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Renja, seperti terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya anggaran berbeda.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinsos P2KB.

# BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinsos P2KB.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsos P2KB.

## 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

---

Rencana Kerja (Renja) Dinsos P2KB Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinsos P2KB Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinsos P2KB Kota Pekalongan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2026.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 Dinsos P2KB Kota Pekalongan sebesar Rp. 12.460.916.000,- termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 2 penunjang urusan pemerintahan, 9 program, 17 kegiatan dan 53 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 11.629.223.810,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93.33%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025, dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 11.415.833.000,- akan melaksanakan 2 unsur penunjang urusan pemerintahan, 9 program, 17 kegiatan dan 52 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun

kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinsos P2KB sebagai berikut:

1. Keterbatasan akses terhadap data dan informasi yang relevan dalam proses perencanaan dalam bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Koordinasi antar *stake holder* tidak maksimal menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan;
3. Komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD perlu ditingkatkan dalam merencanakan kegiatan.
4. Manajemen risiko yang disusun pada akhir tahun dimana proses perencanaan penganggaran sudah sampai pada tahap RAPBD sehingga belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga potensi risiko belum dikelola secara proaktif dan reaktif.
5. Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah bahwa hanya terdapat satu indikator dalam satu sub kegiatan sehingga perlu sinkronisasi dengan target kinerja pada periode sebelumnya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinsos P2KB dalam pelaksanaan urusan bidang sosial dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu yaitu tahun 2024, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2024 pada Dinsos P2KB Kota Pekalongan dari urusan bidang sosial dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan dengan 9 program :

Adapun evaluasi kinerja hasil/ keluaran program/kegiatan/subkegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Pada pelaksanaan Renja Dinsos P2KB Kota Pekalongan tahun 2024, ada tiga program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang diharapkan yaitu pada program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pengendalian Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial mempunyai target sebesar 55.12% sedangkan terealisasi 27.64% sehingga

capaiannya mencapai 50.15%. Hal ini disebabkan perbandingan jumlah penerima sembako ( BPNT ) dan PKH jauh lebih sedikit daripada jumlah DTKS pada Kota Pekalongan, meskipun ada upaya update verval data. Program Pengendalian Penduduk dengan indikator Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga mempunyai target sebesar 100% sedangkan terealisasi 82.60% sehingga capaiannya mencapai 82.60%. Hal ini disebabkan pada kegiatan pendataan dilaksanakan dengan cara pengambilan data secara sampling dari jumlah seluruh rumah tangga sekota Pekalongan. Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan indikator Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun mempunyai target sebesar 7.60% sedangkan terealisasi 11.28% sehingga capaiannya mencapai 67.40%. Hal ini disebabkan tidak memenuhi target dikarenakan meningkatnya angka perkawinan dibawah 21 tahun sebagai dampak dari adanya kemiskinan dan kenaikan jumlah anak tidak sekolah.

Faktor yang mendukung tercapainya target kinerja adalah adanya komitmen Pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana dari APBD dan peluang belanja (DAK) oleh pemerintah pusat serta makin pesatnya perkembangan teknologi yang memungkinkan makin terbukanya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator dapat mengukur kinerja pada kegiatan hingga subkegiatan secara spesifik dan tidak terjadi duplikasi dengan indikator lainnya. Sehingga dalam penghitungan realisasi kinerja pada periode akhir renstra dapat secara akurat tersajikan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DINSOS P2KB Kota Pekalongan yang sudah dilakukan mapping berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, didasarkan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024. Capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini :

**Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DINSOSP2KB S/D TAHUN 2024  
KOTA PEKALONGAN**

**OPD : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

02	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal ( Renstra 2021-2025 )	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian Renstra s.d Tahun 2024	Persentase capaian target Renstra	Status Capaian
						Target 2024	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100.01	100	100.01	Tercapai
2.	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4.	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100.13	100.13	100.13	Tercapai
4.	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5.	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100.38	100.38	100.38	Tercapai
6.	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7.	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
8.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	75	42	65.41	67	100	133.33	149.25	Tercapai
9.	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	Persen	10	10	13.61	10	77.30	773.00	772.96	Tercapai
10.	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	75	75	42.50	75	89.44	119.23	119.25	Tercapai
11.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna	Persen	100	100	100	100	126.14	126.14	126.14	Tercapai

02	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal ( Renstra 2021-2025 )	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian Renstra s.d Tahun 2024	Persentase capaian target Renstra	Status Capaian
						Target 2024	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)									
12.	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	Persen	100	100	98.98	100	132.89	132.89	132.89	Tidak Tercapai
13.	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	Persen	3.98	3.32	4.62	3.68	8.80	265.06	239.13	Tercapai
14.	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	Persen	52.49	60.45	57.38	55.12	27.64	45.72	50.15	Tercapai
15.	Persentase graduasi KPM PKH	Persen	10	10	11.65	2.25	11.65	116.50	22.52	Tercapai
16.	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
17.	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persen	100	100	100	100	102.33	100	100.23	Tercapai
18.	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
19.	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
20.	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	Persen	100	100	70.28	100	82.60	82.60	82.60	Tidak Tercapai
21.	Persentase ketersediaan dokumen KKBPBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
22.	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 Tahun	Persen	7.2	8.2	14.44	12	11.28	156.66	106.42	Tidak Tercapai
23.	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	Perseribu	7.74	9.72	8.88	8.73	0.34	4.39	2587.50	Tercapai
24.	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Persen	20.8	19.8	29.50	20.40	47.54	228.55	113.25	Tercapai

02	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal ( Renstra 2021-2025 )	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian Renstra s.d Tahun 2024	Persentase capaian target Renstra	Status Capaian
						Target 2024	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Unmeet need KB	Persen	12	17	14.95	14	8.48	141.50	165.18	Tidak Tercapai
26.	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.**

---

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DINSOS P2KB Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan.

### **Tugas dan Fungsi DINSOS P2KB**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinsos P2KB Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial, bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan sasaran, program urusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
- g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kinerja pelayanan DINSOSP2KB Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik pada urusan Sosial, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

Berikut adalah tabel realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Dinsos P2KB Kota Pekalongan :

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota**  
**Pekalongan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 dan Tahun 2026**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	7	8		9		10	11	12
1	Nilai SAKIP OPD	-	IKU RENSTRA	73.00	74.50	74.90	77.50	74.40	75.90	74.90	77.50	indeks
2	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	IKU RENSTRA	3.43	3.55	3.68	3.82	17.64	16.68	3.68	3.82	persen
3	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	-	IKU RENSTRA	67.50	67.55	67.60	67.65	61.46	64.41	67.60	67.65	persen
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM Bidang Sosial	IKK OUTCOME	100	100	100	100	100	126.14	100	100	Persen
5	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	SPM Bidang Sosial	IKK OUTCOME	100	100	100	100	100	100	100	100	Persen

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2025

## **2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

### **2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja**

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Pemerintah Kota Pekalongan, DINSOSP2KB Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, DINSOSP2KB Kota Pekalongan mendukung pencapaian visi “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius” dengan misi pertama “Meningkatkan Kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat” dan misi ketujuh “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance dan Clean Government*”

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu Strategis berkaitan dengan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
3. Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana dan pengendalian penduduk keluarga berencana.

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan

dan hambatan yang dihadapi.

Kapasitas sumberdaya manusia di DINSOSP2KB Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan tingginya target pencapaian sasaran dan tujuan indikator belumlah ideal. Pengalaman penanganan kemiskinan, kebencanaan dan *stunting* yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum optimalnya sistem pelayanan publik.
2. Belum optimalnya kinerja organisasi
3. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS
4. Belum optimalnya pencapaian peserta KB aktif

### **2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi**

Penanggulangan bencana yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini DINSOSP2KB Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik DINSOSP2KB Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, kinerja DINSOSP2KB Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian visi "*Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius*" dengan misi pertama "*Meningkatkan Kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat*" dan misi ketujuh "*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisiem berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government*"

### **2.3.4 Tantangan dan Peluang**

Berdasarkan Tugas dan Fungsi utama berkaitan dengan kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Renstra Kementerian Sosial, Renstra BKKBN, hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS Kota pekalongan, maka hal-hal yang menjadi tantangan dan peluang pada Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

#### **1.3.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan pada Dinsosp2kb antara lain :

## 1. **Urusan Sosial**

- a) Belum optimalnya system pelayanan publik
- b) Minimnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerja sosial.
- c) banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tetapi masih terbatasnya sarana penunjang.
- d) belum adanya database PMKS serta belum adanya terminasi (penyelesaian penanganan) PMKS secara berkelanjutan.
- e) Terbatasnya jumlah personil yang ada dibanding dengan jumlah PMKS yang perlu ditangani.

## 2. **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a) Belum optimalnya para penyelenggara kegiatan kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS.
- b) Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok kegiatan (Poktan) oleh petugas.
- c) Perlu lebih besar lagi dukungan stakeholder, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan keluarga yg berketahanan.
- d) Cara kerja / sistem komando yg kurang sinkron antara OPD KB kabupaten kota dengan para penyuluh KB yg statusnya sebagai tenaga pusat.
- e) Kurangnya pemahaman remaja tentang usia kawin pertama.
- f) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti KB pasca persalinan

### 1.3.4.2 **Peluang**

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program pada urusan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Pekalongan antara lain :

- a. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah PMKS dan penurunan angka fertilitas penduduk;

- b. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
- c. Terbukanya pengembangan kapasitas DINSOSP2KB melalui kerjasama dengan lembaga baik urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi antar DINSOSP2KB Kota Pekalongan dengan masyarakat.
- e. Adanya peran serta masyarakat, PSKS dan LSM dalam penurunan jumlah PMKS,
- f. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana dalam operasional urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana melalui kementerian / lembaga teknis.
- g. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana dari APBD dan peluang belanja (Dana Alokasi Khusus) oleh pemerintah pusat.
- h. Adanya usaha-usaha peningkatan SDM tenaga pengelola KB oleh BKKBN perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupa kegiatan orientasi dan pelatihan
- i. Adanya advokasi program KB terhadap pimpinan daerah kabupaten/kota.
- j. Tercukupinya rasio jumlah Penyuluh KB terhadap jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut maka kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja;
2. Meningkatkan dukungan administrasi perkantoran;
3. Meningkatkan dukungan ketercukupan sarpras aparatur;
4. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
5. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan;
7. Peningkatan Perlindungan dan layanan jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin.;
8. Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
9. Peningkatan graduasi KPM PKH;
10. Optimalisasi database kemiskinan;
11. Optimalisasi bantuan sosial bagi kelompok rentan;
12. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Taman Makam pahlawan;
13. Optimalisasi pendataan/updating data keluarga;
14. Penurunan angka kelahiran umur 15-19 tahun;
15. Peningkatan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);

16. Peningkatan peran serta ormas dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kebijakan yang tepat bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan serta program nasional maupun program SDGs (Sustainable Development Goals ).

### **2.3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah.

Isu Strategis pada pelayanan urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

#### **1. Pelayanan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Berdasarkan Peraturan Daerah ( PERDA ) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

#### **2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Sosial**

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Sasaran Jangka Menengah pada Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu

#### **3. Sasaran jangka menengah pada Renstra BKKBN**

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, sasaran Renstra pada BKKBN adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.
2. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.
4. Meningkatkan advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran.
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi

#### **4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, telah ditetapkan 3 (tiga) pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK), yang meliputi : KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSK dari sudut kepentingan sosial budaya dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan untuk struktur ruang wilayah kota meliputi Pusat Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK), 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota dan 6 (enam) Pusat Lingkungan; serta Sistem Jaringan Prasarana

Meninjau RTRW Kota Pekalongan tentang pengembangan kawasan strategis Kota Pekalongan tersebut maka pelayanan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memiliki peluang dalam mencapai Indikator Kinerja Penurunan Warga Miskin (DTKS)

#### **5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kondisi lingkungan di Kota Pekalongan merupakan wilayah rawan bencana hal ini disebabkan letak/wilayah Kota Pekalongan yang berada di pesisir pantai utara dan adanya penurunan permukaan tanah dengan rata-rata 11-23 cm per tahun, bencana yang terjadi di Kota Pekalongan ini menyebabkan rusaknya infrastruktur, mengganggu kesehatan dan berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, Peningkatan abrasi

merusak bangunan di sekitar pesisir, hilangnya tambak dan sawah serta meningkatnya kerusakan mangrove.

Ditinjau dari kondisi lingkungan di Kota Pekalongan tersebut, maka pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki hambatan yang cukup besar terutama pada kondisi bencana rob yang menyebabkan banyaknya warga Kota Pekalongan yang terkena dampak rob yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya dan hal ini dapat menjadi penyebab menurunnya kesejahteraan hidup masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, terutama pada faktor KLHS dapat diketahui bahwa isu yang muncul di Kota Pekalongan adalah pada permasalahan lingkungan hidup Kota Pekalongan yang dapat menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat seperti pencemaran air dan penurunan muka tanah (amblesan) yang berdampak besar terhadap peningkatan wilayah rawan bencana banjir dan rob.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Dengan disusunnya Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan tahun 2026, telah dirumuskan rancangan program, kegiatan, subkegiatan yang akan dilaksanakan DINSOSP2KB Kota Pekalongan tahun 2026. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan membandingkan rumusan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan OPD, terdapat perbedaan yang menyebabkan perubahan perumusan kebutuhan tersebut.

Perubahan rumusan kebutuhan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif dan optimal. Perubahan tersebut antara lain anggaran pagu kegiatan dan penyesuaian target dan indikator kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 dapat dilihat pada tabel T-C.31. sebagai berikut :

**Tabel T-C.31.**

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan**

Rancangan Awal RKPD						
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	CATATAN PENTING
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	<b>3.644.673</b>	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	21.272	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.132	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	5.720	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	12.420	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.610.150	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.567.467	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	39.300	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.383	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	5.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	260.800	

Rancangan Awal RKPD						
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	CATATAN PENTING
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.300	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	60.000	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	10.000	
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	75.000	
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	7.500	
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1.000	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	100.000	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	385.561	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.000	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	177.561	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	207.000	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	361.890	

Rancangan Awal RKPD						
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	CATATAN PENTING
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	68 unit	236.890	
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	75.000	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	50.000	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	355.120	
7.	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen	191.440	
7.1	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Keluarga	191.440	
8.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen	163.680	
8.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	30.000	
8.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	34 orang	133.680	
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1.666.592	

Rancangan Awal RKPD						
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	CATATAN PENTING
9.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen	1.193.292	
9.1	Penyediaan Permakanan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	457.932	
9.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Pekalongan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	675.120	
9.3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	60.240	
10.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.98 persen	473.300	
10.1	Penyediaan Permakanan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2168 orang	333.800	
10.2	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	20.000	
10.4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Pekalongan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	17.500	
10.5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	52.000	
10.6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	50.000	

Rancangan Awal RKPD						
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	CATATAN PENTING
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	52.49 persen	1.075.000	
11.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase graduasi KPM PKH	10 persen	1.075.000	
11.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 orang	330.000	
11.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1050 Orang	745.000	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	332.500	
12.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen	332.500	
12.1	Penyediaan Makanan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	300.000	
12.2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	22.500	
12.3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Pekalongan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	10.000	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen	57.000	
13	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	57.000	
13.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	57.000	
VII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data Keluarga	100 persen	200.900	

Rancangan Awal RKPD						
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	CATATAN PENTING
14.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan dokumen KKBP (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	<b>200.900</b>	
14.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	50.000	
14.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 laporan	122.100	
14.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 dokumen	28.800	
VIII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	7.20 persen	<b>1.702.320</b>	
15.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	7.74 perseribu	<b>866.196</b>	
15.1	Pengendalian Program KKBP	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP	2 laporan	486.456	
15.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 laporan	96.800	
15.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 laporan	83.120	
15.4	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	75.920	

Rancangan Awal RKPD						
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	CATATAN PENTING
15.5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Pekalongan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 organisasi	123.900	
16.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.8 persen	836.124	
16.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	78.500	
16.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 orang	517.624	
16.3	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	240.000	
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Unmeet need KB	12 persen	<b>1.596.800</b>	
17.	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	1.596.800	
17.1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pekalongan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	708.000	
17.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan	10 laporan	778.800	

Rancangan Awal RKPD						
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	CATATAN PENTING
17.3	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	3 laporan	110.000	

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2025

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

---

Sebelum melakukan penyusunan program, kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, terlebih dahulu telah dilakukan penjangkauan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Usulan awal program, kegiatan dan sub kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik musrenbang kelurahan maupun kecamatan dan kota, serta forum perangkat daerah. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Walikota sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pada proses Rancangan Awal Renja, belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

---

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Arah kebijakan Nasional yang berdasarkan RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan, dengan mengusung tema “Terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasar gotong royong”. Terdapat 7 agenda (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan Kementerian Sosial sesuai dengan yang tertuang dalam RPJM Kementerian Sosial 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi, penduduk miskin dan rentan;
2. Meningkatkan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu;
4. Terwujudnya tata kelola kementerian sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Sedangkan untuk kebijakan kementerian BKKBN yang tertuang dalam RPJM BKKBN 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter dikeluarga;
2. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayaahan dan focus pada segmentasi sasaran;

4. Meningkatkan advokasi penggerakan program Bangka kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran;
5. Memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

---

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berkewajiban melakukan penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJMD Kota Pekalongan.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis dan juga kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kota Pekalongan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan DINSOSP2KB. Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DINSOSP2KB Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel T-C.25 berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP OPD	79.67 71.50	79.92 73.00	80.17 74.50	80.42 76.00	80.67 77.50
2.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.0 3.32	1.0 3.43	2.0 3.55	2.5 3.68	3.0 3.82
3.	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif	Total fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome) Persentase Pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	2.164 67.45	2.162 67.50	2.160 67.55	2.158 67.60	2.156 67.65

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

---

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program/kegiatan/Subkegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan pemerintah daerah.

Ranwal Rencana kerja tahun 2026 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa Subkegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2026. Pada prinsipnya program, kegiatan dan Subkegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 9 program, 17 kegiatan dan 51 Subkegiatan dengan jumlah pagu Rp. 10.630.905.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>10.630.905.000</b>		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.130.885.000		
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			7.130.885.000		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	3.644.673.000		
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	21.272.000		
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.132.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.610.150.000</b>		
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.567.467.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.383.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>1.06.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>5.000.000</b>		
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>260.800.000</b>		
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>385.561.000</b>		
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	177.561.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	207.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>361.890.000</b>		
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	68 Unit	236.890.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan</b>	<b>75 persen</b>	<b>355.120.000</b>		
<b>1.06.02.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan</b>	<b>10 persen</b>	<b>191.440.000</b>		
1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT					
		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Keluarga	191.440.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif</b>	<b>75 persen</b>	<b>163.680.000</b>		
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	34 Orang	133.680.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.666.592.000</b>		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 Persen	1.193.292.000		
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	457.932.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	675.120.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60.240.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial</b>	<b>3.98 Persen</b>	<b>473.300.000</b>		
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2168 Orang	333.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	17.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					
		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	52.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial</b>	<b>52,49 persen</b>	<b>1.075.000.000</b>		
1.06.05.2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase graduasi KPM PKH</b>	<b>10 Persen</b>	<b>1.075.000.000</b>		
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 Orang	330.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					
		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1050 Orang	745.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)</b>	<b>100 persen</b>	<b>332.500.000</b>		
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>100 persen</b>	<b>332.500.000</b>		
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	22.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen	57.000.000		
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	57.000.000		
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	57.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.500.020.000		
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			3.500.020.000		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen	200.900.000		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	200.900.000		
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					
		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan	122.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 Dokumen	28.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	7,20 persen	1.702.320.000		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	7.74 perseribu	866.196.000		
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK					
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	486.456.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana					
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan	96.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 Laporan	83.120.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	75.920.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 Organisasi	123.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia</b>	<b>20.8 persen</b>	<b>836.124.000</b>		
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	78.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 Orang	517.624.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak					
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	240.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Unmeet need KB</b>	<b>12,00 persen</b>	<b>1.596.800.000</b>		
<b>2.14.04.2.02</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.596.800.000</b>		
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					
		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	708.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			
			Target Capaian	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	778.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi	Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				
		Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	3 Laporan	110.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>J U M L A H</b>				<b>10.630.905.000,00</b>		

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan DINSOSP2KB Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama DINSOSP2KB Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
7. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
8. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab DINSOSP2KB Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 terdapat 9 Program, 17 kegiatan dan 51 Subkegiatan, yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan DINSOSP2KB Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), DAK NonFisik – BOKB - KB, serta DBHCHT.

Rencana Kerja dan Pendanaan DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>10.630.905.000</b>
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>7.130.885.000</b>
<b>1,06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>			<b>7.130.885.000</b>
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</b>	<b>100 persen</b>	<b>3.644.673.000</b>
<b>1.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>21.272.000</b>
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.132.000
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.720.000
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.420.000
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.610.150.000</b>
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.567.467.000
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39.300.000
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.383.000
<b>1.06.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>5.000.000</b>
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>260.800.000</b>
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.300.000
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	60.000.000
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.000.000
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.000.000
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.500.000
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	100.000.000
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>385.561.000</b>
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.000.000
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	177.561.000
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	207.000.000
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>361.890.000</b>
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	68 Unit	236.890.000
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	75.000.000
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	50.000.000
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan</b>	<b>75 persen</b>	<b>355.120.000</b>
<b>1.06.02.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan</b>	<b>10 persen</b>	<b>191.440.000</b>
1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT			
		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Keluarga	191.440.000
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif</b>	<b>75 persen</b>	<b>163.680.000</b>
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	30.000.000
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	34 Orang	133.680.000
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.666.592.000</b>
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.193.292.000</b>
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	457.932.000
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	675.120.000
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60.240.000
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial</b>	<b>3.98 Persen</b>	<b>473.300.000</b>
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2168 Orang	333.800.000
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20.000.000
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	17.500.000
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			
		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	52.000.000
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50.000.000
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial</b>	<b>52,49 persen</b>	<b>1.075.000.000</b>
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase graduasi KPM PKH</b>	<b>10 Persen</b>	<b>1.075.000.000</b>
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 Orang	330.000.000
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1050 Orang	745.000.000
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)</b>	<b>100 persen</b>	<b>332.500.000</b>
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>100 persen</b>	<b>332.500.000</b>
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	300.000.000
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	22.500.000
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	10.000.000
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan</b>	<b>100 persen</b>	<b>57.000.000</b>
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan</b>	<b>100 persen</b>	<b>57.000.000</b>
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	57.000.000
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>3.500.020.000</b>

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
<b>2,14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>3.500.020.000</b>
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga</b>	<b>100,00 persen</b>	<b>200.900.000</b>
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)</b>	<b>100 persen</b>	<b>200.900.000</b>
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			
		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	50.000.000
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan	122.100.000
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 Dokumen	28.800.000
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun</b>	<b>7,20 persen</b>	<b>1.702.320.000</b>
<b>2.14.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19) (IKK Output)</b>	<b>7.74 perseribu</b>	<b>866.196.000</b>
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK			
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	486.456.000
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana			
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan	96.800.000
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 Laporan	83.120.000
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	75.920.000
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 Organisasi	123.900.000
<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia</b>	<b>20.8 persen</b>	<b>836.124.000</b>
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	78.500.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 Orang	517.624.000
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	240.000.000
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Unmeet need KB</b>	<b>12,00 persen</b>	<b>1.596.800.000</b>
<b>2.14.04.2.02</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.596.800.000</b>
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	708.000.000
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	778.800.000
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga			
		Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	3 Laporan	110.000.000
<b>J U M L A H</b>				<b>10.630.905.000,00</b>

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2025

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Awal Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam merencanakan dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Awal DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan selama satu tahun kedepan. Renja disusun mengacu pada visi misi Walikota Pekalongan dan berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Renstra DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026.

#### **V.1 Catatan Penting**

Terbatasnya alokasi anggaran serta proses penganggaran dalam menerapkan SPM yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan penerapan SPM. Untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

#### **V.2 Kaidah Pelaksanaan**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Substansi Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan tahun 2026 dan Renstra Perubahan Ketiga DINSOSP2KB Kota Pekalongan tahun 2021-2026.
- b. DINSOSP2KB Kota Pekalongan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Awal DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026.

- c. DINSOSP2KB Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 yang berpedoman kepada Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2026 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2026, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun 2026.

### **V.3 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana Kerja (RENJA) Awal DINSOSP2KB Kota Pekalongan selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DINSOSP2KB. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf DINSOSP2KB Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Ranwal Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Apabila terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja yang telah direncanakan, baik diakibatkan oleh anggaran yang kurang memadai ataupun permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Ranwal Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 28 Februari 2025  
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Pekalongan



**YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.**  
NIP. 19660516 198603 1 007